

INDIKATOR KESEJAHTERAAN RAKYAT KOTA SEMARANG 2016



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**



INDIKATOR
KESEJAHTERAAN RAKYAT
KOTA SEMARANG

2016

Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang 2016

ISSN : -

No. Publikasi : 33740.1707

Katalog : 4102004.3374

Ukuran Buku : 21 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : vi + 48 halaman

Naskah :

Elwan Heryanto, S.S.T

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Gambar Cover oleh :

Seksi IPDS

Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Ilustrasi Kover : -

Diterbitkan oleh/*Published by:*

© BPS Kota Semarang

Dicetak oleh/*Printed by:*

CV. Citra Yunda

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

Di sadari bahwa istilah kesejahteraan sebenarnya mencakup bidang - bidang kehidupan yang sangat luas yang tidak semua aspeknya dapat diukur. Isi dari publikasi ini hanya mencakup pada aspek-aspek yang dapat diukur dan tersedia datanya. Untuk memudahkan interpretasi, perubahan taraf kesejahteraan yang luas itu dikaji menurut berbagai bidang yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup manusia.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2016 ini menyajikan gambaran taraf kesejahteraan rakyat di Kota Semarang, perkembangannya antar waktu dan perbandingannya antar daerah. Sumber data yang digunakan adalah data mutakhir yang tersedia di Badan Pusat Statistik Kota Semarang dan dari instansi lain di luar BPS.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang Tahun 2016 ini terwujud berkat kerjasama antara Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Semarang dengan Badan Pusat Statistik Kota Semarang. Kepada semua pihak yang telah membantu hingga terwujudnya publikasi ini diucapkan banyak terima kasih. Kritik dan saran dari pemakai data sangat kami harapkan demi kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Akhirnya kami berharap bahwa buku ini bermanfaat sebagai salah satu acuan dalam menentukan skala prioritas perencanaan program-program pembangunan.

Semarang, September 2017

**KEPALA DISKOMINFO
KOTA SEMARANG**

DR.Ir. NANA STORADA DM, SE,MM

NIP. 19640309 199003 1 010

**KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**



ERISMAN, M.Si

NIP. 19641102 198702 1 001

DAFTAR ISI

	<u>halaman</u>
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
Daftar Gambar	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	2
2. Pengertian Indikator	3
3. Indikator Kesejahteraan Rakyat	6
BAB II. INDIKATOR BIDANG KEPENDUDUKAN	8
1. Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk	9
2. Komposisi Penduduk menurut Umur dan Jenis Kelamin	14
3. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan	17
BAB III. INDIKATOR BIDANG KESEHATAN	21
1. Keluhan Kesehatan	22
2. Penolong Kelahiran	23
3. Keluarga Berencana	25
4. Balita dan Ibu Menyusui	28
BAB IV. INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN	31
1. Rasio Murid-Guru	33
2. Partisipasi Sekolah	34
3. Kemampuan Baca Tulis dan Tingkat Pendidikan	36
BAB V. INDIKATOR BIDANG KETENAGAKERJAAN	38
1. Angkatan Kerja dan Pengangguran	39
2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan	41
BAB VI. INDIKATOR BIDANG PERUMAHAN	43
1. Kondisi Perumahan	44
2. Kualitas Perumahan	46

DAFTAR TABEL

halaman

Tabel 1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang	10
Tabel 2. Jumlah Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Semarang	11
Tabel 3. Persentase Wanita Umur 15 – 49 tahun menurut Status Perkawinan	18
Tabel 4. Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan	23
Tabel 5. Persentase Baduta Menurut Penolong Kelahiran	24
Tabel 6. Persentase Wanita Berumur 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Partisipasi Keluarga Berencana	26
Tabel 7. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan	34
Tabel 8. Nilai APK, APM Menurut Jenjang Pendidikan	35
Tabel 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	40
Tabel 10. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan .	42
Tabel 11. Persentase Rumah Menurut Jenis Atap	45
Tabel 12. Beberapa Indikator Kualitas Rumah	46



DAFTAR GAMBAR

	<u>halaman</u>
Gambar 1. Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2016	11
Gambar 2. Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2016	15
Gambar 3. Penduduk 10 Tahun keatas menurut Status Perkawinan	17
Gambar 4. Grafik Baduta Menurut Penolong Kelahiran	24
Gambar 5. Persentase Wanita Berumur 15 – 49 Tahun Berstatus Kawin Menurut Partisipasi Keluarga Berencana	27
Gambar 6. Jumlah Baduta Menurut Lamanya Disusui (bulan)	29
Gambar 7. Grafik Nilai APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan	35
Gambar 8. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan	37
Gambar 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang	41



BAB I

PENDAHULUAN

<http://semarangkota.bpt.go.id>

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia merupakan tujuan utama pembangunan kita. Usaha ini dibarengi dengan segala daya untuk meletakkan landasan yang kuat agar supaya pembangunan tahap-tahap berikutnya dapat menjadi lebih terarah dan lancar. Proses pembangunan semacam ini merupakan suatu usaha jangka panjang yang memerlukan data penunjang untuk setiap tahap dan komponennya. Data yang diperlukan dengan sendirinya haruslah mempunyai beberapa persyaratan, yaitu kaitannya yang sangat tinggi dengan tujuan pembangunan itu sendiri, dapat disajikan tepat pada waktu yang diperlukan dan mampu mencerminkan hal-hal yang benar terhadap gejala yang sedang terjadi.

Oleh karena kebutuhan yang sifatnya terus menerus dan dalam segala bidang itulah usaha pembangunan dibarengi juga dengan kebutuhan untuk setiap kali menyempurnakan dan mengembangkan data statistik yang ada. Usaha ini dengan sendirinya mempunyai tujuan yang cukup luas, karena akan meliputi tidak saja usaha memperbanyak macam data yang dikumpulkan dan disajikan, tetapi juga ruang lingkup, kualitas, organisasi pengumpulan dan tidak kalah pentingnya para tenaga yang menangani pengembangan statistik itu sendiri.

Publikasi Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang ini mencoba memberikan materi yang dipandang cukup mempunyai hubungan yang erat

dengan usaha pembangunan dibidang sosial. Usaha ini perlu dikembangkan dan data statistik yang disajikan terus menerus diamati dan disempurnakan.

2. Pengertian Indikator

Kebutuhan untuk melihat fenomena atau masalah dalam perspektif waktu dan tempat, sering menuntut adanya ukuran baku. Dalam ilmu-ilmu sosial salah satu masalah pokok pengembangan ukuran baku itu adalah soal kuantifikasi. Tidak semua masalah sosial mudah dikuantifikasikan. Bahkan sisi paling peka dalam problematik sosial lazimnya mustahil diukur secara angka, misalnya solidaritas sosial, tenggang rasa, gotong royong, ketahanan sosial dan lain sebagainya.

Secara umum langkah yang ditempuh dalam menghadapi pengembangan tolok ukur fenomena yang sifatnya kualitatif, adalah dengan memahami dengan benar konsep dan definisi dan kesepakatan batasan baku masalah yang hendak diukur. Walaupun konsep dan definisi itu berhasil dirumuskan, tidak bisa dijamin bahwa konsep tersebut dapat memberikan arti yang utuh. Namun demikian masih ada beberapa variabel atau tolok ukur kualitatif bidang sosial yang bisa dibuat ukuran kuantitatif atau yang sering disebut dengan indikator.

Indikator merupakan suatu petunjuk yang memberikan indikasi tentang suatu keadaan yang merupakan refleksi dari keadaan tersebut. Dalam definisi lain indikator dapat dikatakan sebagai variabel penolong dalam mengukur perubahan. Variabel-variabel tersebut terutama digunakan apabila perubahan yang akan dinilai tidak dapat diukur secara langsung.

Indikator yang baik harus dapat memenuhi beberapa persyaratan, antara lain :

- a. Sahih (valid), indikator harus dapat mengukur sesuatu yang sebenarnya akan diukur oleh indikator tersebut;
- b. Obyektif, untuk hal yang sama indikator harus memberikan hasil yang sama pula, walaupun dipakai oleh orang yang berbeda pada waktu yang berbeda;
- c. Sensitif, perubahan yang kecil mampu dideteksi oleh indikator;
- d. Spesifik, indikator hanya mengukur perubahan situasi yang dimaksud. Namun demikian perlu disadari bahwa tidak ada ukuran baku yang benar-benar dapat mengukur tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat.

Indikator bisa bersifat tunggal (indikator tunggal) yang isinya dari satu indikator, seperti Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan bersifat jamak (indikator komposit) yang merupakan gabungan dari beberapa indikator, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan gabungan dari indikator Angka Harapan Hidup, indikator melek huruf dan rata-rata lama sekolah dan indikator daya beli masyarakat.

Menurut jenisnya, indikator dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :

- a. Indikator Input, yang berkaitan dengan penunjang pelaksanaan program dan turut menentukan keberhasilan program, seperti : rasio murid-guru, rasio dokter-penduduk dll.

- b. Indikator Proses, yang menggambarkan bagaimana proses pembangunan berjalan, seperti: TPAK, Angka Partisipasi Murni, dan sebagainya.
- c. Indikator Output/Outcome, yang menggambarkan bagaimana hasil (output) dari suatu kegiatan telah berjalan, seperti : angka harapan hidup, TPAK dll.

Indikator input, proses, dan output/outcome tidak selalu dapat secara jelas dipisahkan karena suatu output/outcome dari suatu program dapat saja merupakan input untuk program lainnya.

Ukuran-ukuran yang sering digunakan dalam indikator :

- a. Jumlah, misalnya jumlah penduduk;
- b. Rasio, yang merupakan suatu perbandingan antara dua bilangan dan dapat dinyatakan dalam persentase, misalnya : rasio jenis kelamin, rasio murid-guru dll;
- c. Proporsi, yang menyatakan suatu perbandingan antara suatu bagian bilangan (jumlah) dengan bilangan/jumlah keseluruhan;
- d. Angka/Tingkat adalah jumlah unit yang mengalami suatu peristiwa/kejadian dibandingkan dengan jumlah unit yang berpeluang mengalami/mempunyai resiko peristiwa tersebut. Angka/Tingkat ini merupakan suatu bentuk khusus dari rasio atau proporsi. Misalnya : Angka Kelahiran Kasar, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dll.

3. Indikator Kesejahteraan Rakyat

Sejalan dengan pengertian umum diatas, maka Indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) dapat didefinisikan sebagai berikut :

Indikator Kesejahteraan Rakyat adalah ringkasan dari serangkaian data statistik kesejahteraan yang diturunkan dan disusun untuk menggambarkan suatu keadaan atau kecenderungan keadaan-keadaan kesejahteraan yang menjadi atau akan menjadi pokok perhatian atau usaha pembangunan masyarakat.

Salah satu kegunaan terpenting dari suatu indikator Kesejahteraan Rakyat (Inkesra) adalah untuk membandingkan tingkat kesejahteraan beberapa kelompok masyarakat baik menurut golongan, negara/daerah, maupun waktu. Bagi para penentu kebijakan, suatu ukuran perbandingan yang dapat menggambarkan secara menyeluruh keadaan kesejahteraan rakyat sangat diperlukan. Hasil pengukuran ini haruslah merupakan hal yang sederhana dan mudah diartikan sehingga mereka segera dapat membaca keadaan kesejahteraan secara global dan membuat evaluasi.

Dengan memperhatikan fokus, masalah dan pembatasan yang telah diuraikan diatas, maka disusunlah serangkaian Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Semarang yang terbagi menjadi beberapa bidang pembahasan, yaitu :

- a. Indikator Bidang Kependudukan
- b. Indikator Bidang Kesehatan
- c. Indikator Bidang Pendidikan

- d. Indikator Bidang Ketenagakerjaan
- e. Indikator Bidang Perumahan.

Penggolongan diatas sejauh mungkin disesuaikan dengan pembidangan usaha pembangunan dibidang sosial, yang sekaligus telah mencakup aspek-aspek perikehidupan masyarakat serta penduduk pada umumnya dalam bidang kesejahteraan sosial masyarakat.



BAB II

JNDIKATOR BIDANG

KEPENDUDUKAN

<http://semarangkota.go.id>

INDIKATOR BIDANG KEPENDUDUKAN

Dalam mekanisme perencanaan pembangunan, penduduk dilihat sebagai salah satu faktor strategis, karena disadari posisi mereka bukan hanya sebagai sasaran tetapi juga sebagai pelaksana pembangunan. Atas dasar pemikiran tersebut, pembangunan dititik beratkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Kualitas sumber daya manusia diperlukan karena jumlah penduduk yang besar merupakan modal atau aset pembangunan jika kualitasnya baik, sebaliknya hanya akan menjadi beban manakala kualitasnya rendah.

1. Jumlah, Kepadatan dan Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Kota Semarang pada tahun 2016 tercatat sebesar 1.602.717 jiwa. Jika diurutkan menurut kabupaten/kota se Jawa Tengah, jumlah penduduk Kota Semarang termasuk dalam 5 (lima) besar dengan urutan sebagai berikut: kabupaten Brebes memiliki jumlah penduduk terbanyak, urutan kedua kabupaten kota Semarang, urutan ketiga Cilacap, urutan keempat kabupaten Banyumas dan urutan kelima kabupaten Tegal.

Perkembangan dan pertumbuhan penduduk selama 6 tahun terakhir (2011-2016) menunjukkan tren naik. Hal tersebut dapat dilihat dari angka pertumbuhan penduduk yang selalu bernilai positif selama kurun waktu tersebut, namun demikian laju pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun dapat dikatakan semakin melambat dari 1,11 persen pada tahun 2011 menjadi 0,47 persen di tahun 2016. Pertumbuhan penduduk yang terakhir,

dimungkinkan memiliki korelasi, baik dengan tingkat kelahiran kasar dan tingkat migrasi masuk yang juga menurun, maupun dengan tingkat migrasi keluar yg nilainya meningkat.

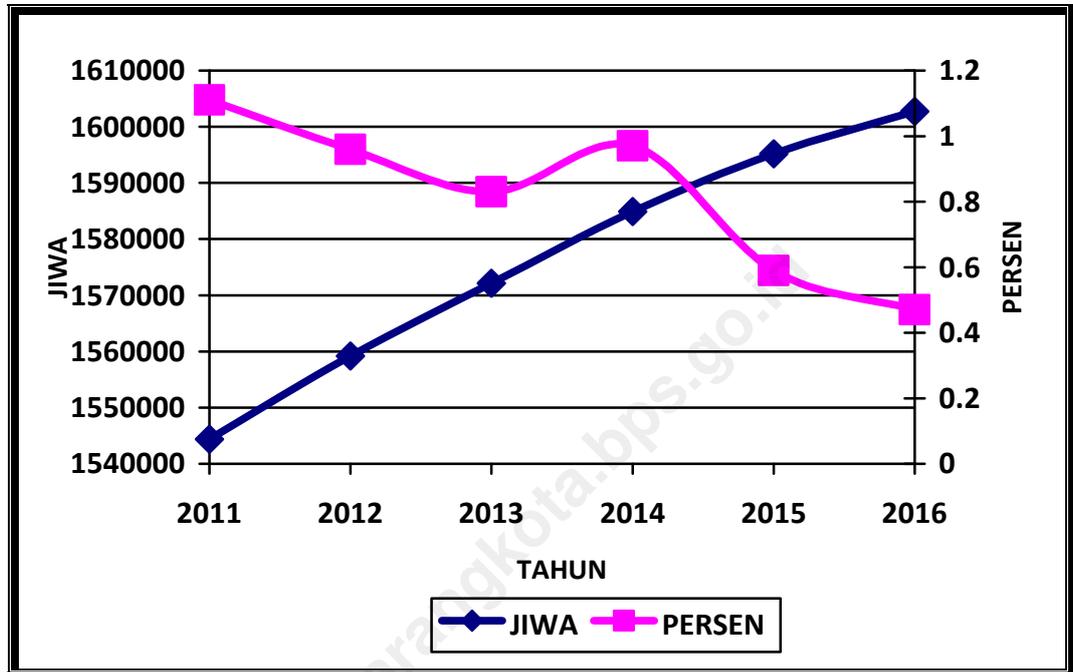
Tabel 1. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang

Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2011	1.544.358	1,11
2012	1.559.198	0,96
2013	1.572.105	0,83
2014	1.584.906	0,97
2015	1.595.187	0,59
2016	1.602.717	0,47

Sumber : BPS Kota Semarang (Registrasi Penduduk)

Pertumbuhan penduduk dibedakan atas tingkat pertumbuhan alamiah dan tingkat pertumbuhan karena migrasi atau perpindahan. Tingkat pertumbuhan alamiah secara sederhana dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang lahir dan mati. Pada periode waktu tertentu digambarkan dengan Angka Kelahiran Kasar atau *Crude Birth Rate* (CBR) dan Angka Kematian Kasar atau *Crude Death Rate* (CDR) yang merupakan perbandingan antara jumlah kelahiran dan kematian dengan jumlah penduduknya selama periode satu tahun.

Gambar 1. Grafik Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Kota Semarang Tahun 2016



Tabel 2. Jumlah Kelahiran dan Kematian Penduduk Kota Semarang

Tahun	Kelahiran	Kematian	CBR	CDR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2011	24.910	10.454	16,09	6,76
2012	23.634	10.012	15,23	5,87
2013	23.765	10.249	15.18	6.55
2014	24.979	10.860	15,63	6,80
2015	22.609	10.764	14,22	6,77
2016	22.202	11.165	13,81	6.95

Sumber : BPS Kota Semarang

Selama periode tahun 2011–2016, jumlah kelahiran berkisar 22 ribu hingga hampir 25 ribu jiwa per tahun atau dengan kata lain, terdapat 14 hingga 16 kejadian kelahiran per seribu penduduk selama kurun waktu satu tahun. Tingkat kelahiran tertinggi terjadi pada tahun 2011 yakni sebesar 16,09 dan tingkat kelahiran terendah terjadi pada tahun ini yakni sebesar 13,81 atau selama tahun 2016 terdapat sebanyak 22.202 jiwa terlahir di Kota Semarang.

Kematian penduduk selama kurun waktu enam tahun terakhir berkisar pada angka 10 ribu jiwa per tahun atau dengan kata lain jumlah penduduk meninggal per 1000 penduduk dalam kurun waktu tersebut berkisar antara 6 hingga 7 jiwa per tahun per seribu penduduk. Tingkat kematian tertinggi terjadi pada tahun ini yakni mencapai 6,95 jiwa per 1000 penduduk, sedangkan tingkat kematian terendah terjadi di tahun 2012 mencapai 5,87 jiwa per 1000 penduduk.

CDR dan CBR merupakan indikator kasar tentang kematian dan kelahiran penduduk di suatu wilayah pada periode tertentu, pada tahun 2016 angka CBR sebesar 13,81 , angka ini dapat diartikan bahwa setiap 1.000 penduduk bertambah sekitar 14 orang karena kelahiran. Sedangkan angka CDR sebesar 6,95 , angka ini dapat diartikan bahwa setiap 1.000 penduduk selama kurun waktu satu tahun jumlah penduduk berkurang 7 jiwa karena meninggal. Dengan demikian selisih dari keduanya adalah sebesar 7 orang tiap seribu penduduk, bila angka tersebut dinyatakan dalam persen maka nilainya menjadi 0,69 % , merupakan angka pertumbuhan penduduk alamiah atau Rate of Natural Increase (RNI).

Pertumbuhan penduduk karena perpindahan (*net migration*), dihitung dengan melihat selisih antara angka penduduk yang datang (*in migration*) dan angka penduduk yang pergi (*out migration*). Pada tahun 2016 tingkat migrasi masuk sebesar 21,28, angka ini dapat diartikan bahwa dalam kurun waktu 1(satu) tahun wilayah kota Semarang kedatangan penduduk sebanyak 21 orang per 1000 penduduk, sedangkan tingkat migrasi keluar sebesar 23,47 per 1.000 penduduk. Bila migrasi masuk dikurangi dengan migrasi keluar diperoleh angka sebesar minus -2,19, angka inilah yang dinamakan dengan angka pertumbuhan penduduk karena migrasi (*net migration rate*).

Penyebaran penduduk perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung lingkungannya. Sebagai kota besar, Semarang terkategori sebagai wilayah berkepadatan penduduk tinggi, pada tahun 2015, kepadatan penduduknya sebesar 4.289 jiwa per km², sedikit mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2015. Tiga wilayah kecamatan dengan kepadatan terendah yakni Kecamatan Tugu sebesar 1.008 jiwa per km², Kecamatan Mijen (1.102 jiwa/km²), dan Kecamatan Gunungpati (1.478 jiwa/km²). Ketiga wilayah kecamatan menyandang kepadatan penduduk terendah karena wilayah tersebut merupakan daerah pertanian dan perkebunan (kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Mijen), sedangkan Kecamatan Tugu merupakan daerah pengembangan industri. Sebaliknya untuk Kecamatan-Kecamatan yang terletak di pusat kota, dimana luas wilayahnya tidak terlalu luas namun jumlah penduduknya sangat banyak menjadikan kepadatan penduduknya sangat tinggi. Kepadatan penduduk tertinggi adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 13.354 jiwa per km², Kecamatan Candisari (12.059 jiwa/km²), Kecamatan Gayamsari (12.000

jiwa/km²), Kecamatan Semarang Utara (11.589 jiwa/km²) dan Kecamatan Semarang Tengah (11.354 jiwa/km²).

2. Komposisi Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin

Selain jumlah, kepadatan maupun pertumbuhan penduduk, hal lain yang perlu diketahui adalah komposisi penduduk, antara lain komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Dikatakan penting karena kejadian demografis maupun karakteristiknya berbeda menurut umur dan jenis kelamin baik untuk kelahiran, kematian maupun perpindahan penduduk. Kelahiran menurut jenis kelamin jelas berbeda, pada saat dilahirkan umumnya jumlah bayi pria lebih banyak dari bayi wanita.

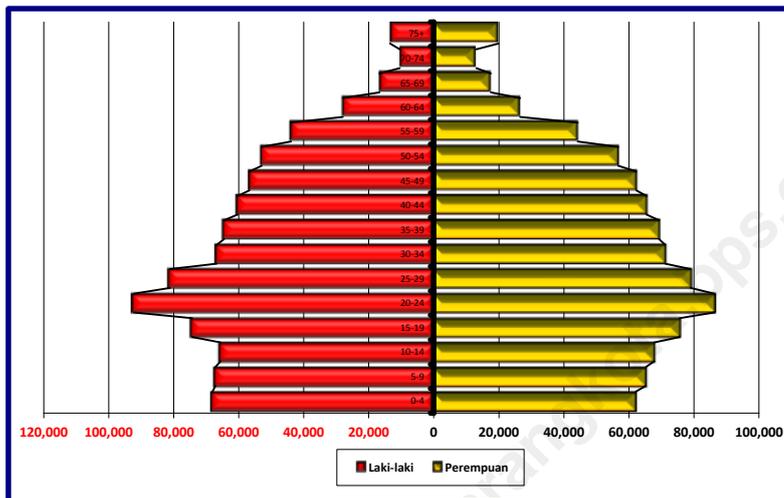
Tingkat kematian juga berbeda menurut umur, yaitu resiko kematian sangat tinggi pada kelompok umur kurang dari satu tahun. Usia harapan hidup juga berbeda menurut jenis kelamin yaitu wanita cenderung lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Sementara perpindahan penduduk lebih banyak dilakukan oleh kelompok usia produktif dan lebih banyak dilakukan laki-laki dibandingkan perempuan terutama migrasi untuk jarak tempuh yang jauh. Dan seperti pola ini akan mengalami pergeseran seiring dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja wanita yang bekerja di luar negeri.

▪ Struktur Umur Penduduk

Berbagai cara dilakukan untuk menggambarkan struktur penduduk menurut umur, diantaranya adalah dengan distribusi frekwensi, distribusi presentase, rasio dan grafik batang atau piramida penduduk. Dari penduduk menurut umur tersebut dapat dihasilkan beberapa indikator yang salah

satunya adalah Angka Beban Ketergantungan (dependency ratio), yang menggambarkan beban penduduk produktif terhadap penduduk yang tidak produktif.

Gambar 2. Piramida Penduduk Kota Semarang Tahun 2016



Salah satu cara yang biasa digunakan untuk menggambarkan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin adalah dengan piramida penduduk (lihat gambar 1). Bentuk piramida penduduk dari suatu wilayah pada tahun tertentu dapat mencerminkan dinamika kependudukan di wilayah tersebut, seperti kelahiran, kematian dan migrasi. Suatu wilayah dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi biasanya ditandai dengan bentuk piramida yang alasnya besar kemudian berangsur mengecil hingga ke puncak piramida. Sedangkan pada wilayah dengan tingkat kelahiran dan kematian yang rendah mempunyai bentuk piramida dengan alas yang tidak begitu besar dan tidak langsung mengecil hingga puncaknya.

Bentuk piramida penduduk Kota Semarang pada tahun 2016 terlihat alas piramidanya tidak terlalu besar, hampir sama dengan bagian tengah piramida. Hal ini bisa diartikan bahwa tingkat kelahiran dan migrasi masuk walaupun masih cukup tinggi namun sudah ada pengendalian. Sedangkan bagian puncak piramida tidak terlalu runcing yang berarti pengendalian terhadap kematian penduduk cukup berhasil.

▪ **Angka Beban Ketergantungan**

Angka beban ketergantungan memberikan gambaran perbandingan antar jumlah penduduk yang produktif (15-64 tahun) dengan yang tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas). Untuk penduduk yang mempunyai struktur muda atau sangat tua sekali, maka beban ketergantungannya sangat tinggi. Di negara-negara berkembang karena struktur umur penduduknya muda, maka angka beban ketergantungannya biasanya relatif tinggi.

Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 38,33 persen, sedangkan angka ketergantungan penduduk muda sebesar 31,62 persen dan angka ketergantungan penduduk tua sebesar 6,71 persen.

▪ **Rasio Jenis Kelamin**

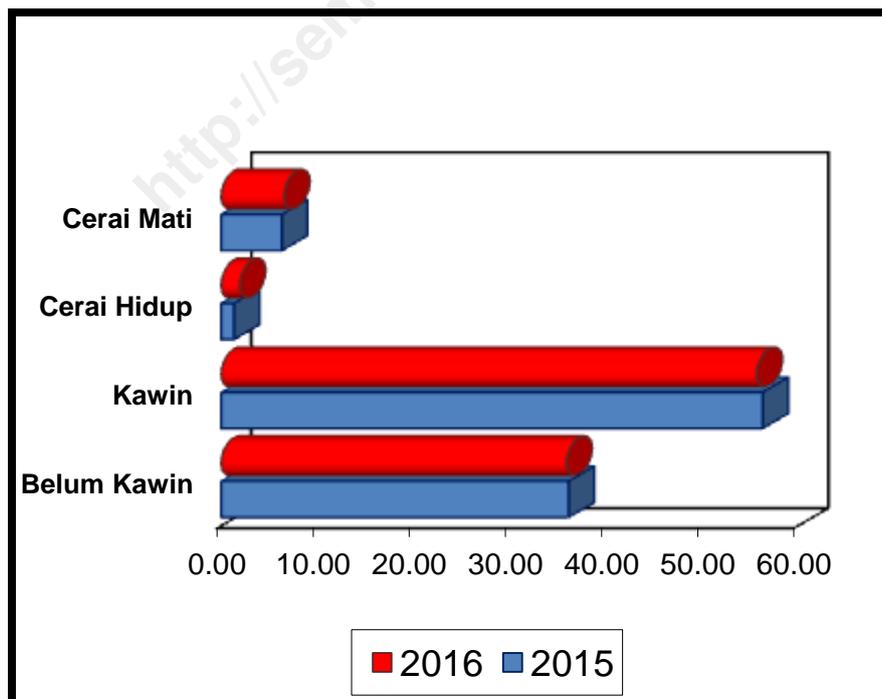
Selain menurut umur komposisi penduduk juga dapat dilihat menurut jenis kelamin. Perbandingan antara penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan akan menghasilkan suatu ukuran yang disebut dengan rasio jenis kelamin (sex ratio). Komposisi penduduk Kota Semarang pada tahun 2016 menurut jenis kelamin adalah : sebanyak 796.772 jiwa merupakan penduduk laki-laki dan 805.945 jiwa adalah penduduk perempuan. Dengan demikian

rasio jenis kelamin (perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan) di Kota Semarang sebesar 98.86 , yang artinya jumlah penduduk perempuan 1,18 persen lebih banyak dari penduduk laki-laki atau setiap 100 penduduk perempuan terdapat 99 penduduk laki-laki.

3. Komposisi Penduduk menurut Status Perkawinan

Status perkawinan penduduk dibedakan atas belum kawin (*single*), kawin (*married*), cerai (*divorce*), janda dan duda (*widow*). Penduduk menurut status perkawinan dapat pula dibedakan menurut jenis kelamin, tempat tinggal serta kelompok umur tertentu.

Gambar 3. Persentase Penduduk 10 Tahun keatas menurut Status Perkawinan



Gambar diatas menunjukkan bahwa komposisi penduduk umur 10 tahun keatas menurut status perkawinan relatif tidak mengalami perubahan dari tahun-ketahun. Sedangkan jika dibandingkan antar tahun pada tiap-tiap status perkawinan, tampak tidak terdapat perbedaan yang signifikan.

Status perkawinan penduduk wanita, utamanya pada kelompok umur 15-49 tahun sangat penting untuk dianalisis, hal ini berkaitan dengan potensinya untuk melahirkan yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan penduduk.

Tabel 3. Persentase Wanita Umur 15 - 49 Tahun Menurut Status Perkawinan Kota Semarang

Status Perkawinan	Tahun 2015	Tahun 2016
(1)	(2)	(3)
1. Belum Kawin	33.23	34.88
2. Kawin	62.75	60.61
3. Cerai Hidup	1.53	2.18
4. Cerai Mati	2.48	2.32

Sumber : BPS Kota Semarang

Komposisi penduduk wanita usia 15-49 tahun menurut status perkawinan masih memiliki pola yang sama dengan tahun sebelumnya

Indikator lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan adalah umur wanita pada perkawinan pertama. Ada dua hal yang menjadi perhatian yaitu apakah umur perkawinan pertamanya sudah sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Perkawinan dan semakin tua atau muda umur perkawinan pertama ini akan sangat berdampak pada tingkat kelahiran penduduk.

Rata-rata umur perkawinan pertama wanita di Kota Semarang dapat diketahui dengan suatu indikator yang dinamakan SMAM (*singulate mean age of marriage*) yaitu rata-rata umur pada perkawinan pertama. Pada tahun 2015 nilai SMAM wanita di Kota Semarang sebesar 25,12 tahun, sedangkan pada tahun 2016, secara rata-rata wanita di Kota Semarang mengakhiri masa lajangnya diusia 25,39 tahun.

Umur rata-rata perkawinan pertama pada kisaran 25 tahun bagi wanita, erat kaitannya dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi, dan pemahaman terhadap perkawinan yang semakin baik, serta karena tuntutan ekonomi atau perkembangan jaman yang mengharuskan wanita untuk bekerja yang pada akhirnya akan berdampak pada tingkat kelahiran penduduk karena masa suburnya semakin berkurang.

Dari sisi gender perkembangan diatas memberikan arti bahwa peran wanita sudah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti, terutama pada kemampuan dan kemandirian yang sangat mempengaruhi posisi tawar wanita terhadap segala aspek kehidupan. Namun jangan terbuai dengan kondisi diatas karena nilai SMAM adalah nilai rata-rata yang tidak menutup kemungkinan masih terdapat wanita dengan usia perkawinan pertamanya masih muda bahkan dibawah umur minimal yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan. Sehingga usaha untuk memberdayakan wanita dalam segala hal agar terus ditingkatkan, karena usaha ini akan berdampak langsung pada kualitas penduduk yang dihasilkan.



BAB III

JNDIKATOR BIDANG

KESEHATAN

<http://semarangkota.go.id>

INDIKATOR BIDANG KESEHATAN

Kondisi kesehatan penduduk merupakan bagian yang sangat penting dari kesejahteraan masyarakat. Sejak awal pemerintah sangat memperhatikan dan berupaya meningkatkan kesehatan masyarakat dengan alasan kemanusiaan, dan karena keuntungan positif dari kesehatan baik bagi individu masyarakat maupun untuk tujuan lain yang diinginkan masyarakat. Status kesehatan masyarakat adalah indikator penting dari seluruh indikator yang ada dan merupakan faktor penting dari produktivitas ekonomi. Anak-anak yang sehat lebih bisa datang ke sekolah, lebih bisa konsentrasi selama di sekolah dan menyerap pendidikan lebih baik. Pekerja - pekerja yang sehat akan sedikit mangkir dan akan lebih produktif selama bekerja. Ibu - ibu yang sehat akan mempunyai bayi yang sehat dan angka kematian dan kelahirannya juga rendah. Karenanya kesehatan dipandang sangat penting dilihat dari aspek non moneter.

Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah melakukan berbagai program baik yang sifatnya promotif, preventif maupun kuratif antara lain melalui pendidikan kesehatan, imunisasi, pemberantasan penyakit menular, penyediaan air bersih dan sanitasi, dan pelayanan kesehatan. Pemerintah memprioritaskan pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat umum, dengan perhatian khusus kepada masyarakat berpenghasilan rendah, daerah kumuh perkotaan, daerah pedesaan, daerah terpencil dan lain sebagainya. Karena pelayanan kesehatan dapat dipengaruhi oleh banyak faktor selain dana, misalnya pendapatan masyarakat, jarak ke lokasi pemberi pelayanan, kualitas pelayanan yang diberikan, maka tidak

selalu upaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah memberikan dampak sesuai dengan yang diharapkan.

Dalam bagian ini indikator kesehatan yang akan dibahas adalah yang bersumber dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik. Keterbatasan data SUSENAS tidak memungkinkan memberikan semua indikator kesehatan yang sudah dijelaskan dimuka, walaupun demikian minimal dapat membantu memberikan gambaran kasar status kesehatan dan perilaku hidup sehat dimasyarakat Kota Semarang.

1. Keluhan Kesehatan

Keadaan kesehatan penduduk dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang status kesehatan penduduk pada umumnya. Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, status kesehatan memberi pengaruh pada tingkat produktivitas.

Pada tahun 2016 status kesehatan penduduk tergambar dari angka kesakitan (persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan), sepertiga penduduk Kota Semarang pernah mengalami keluhan kesehatan yang mencapai 30,87 persen, sedangkan penduduk yang mengalami keluhan kesehatan hingga aktivitas sehari-harinya terganggu mencapai 12,41 persen. Keluhan kesehatan tersebut meliputi beberapa penyakit antara lain: panas, batuk, pilek, asma/sesak nafas, diare/buang-buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi, dan lainnya.

Tabel 4. Persentase Penduduk Yang Pernah Mengalami Keluhan Kesehatan Kota Semarang

Jenis Kelamin	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Laki-laki	32,07	14.68
2. Perempuan	35,22	16.19
3. Laki-laki + Perempuan	33,68	30.87

Sumber : BPS Kota Semarang

2. Penolong Kelahiran

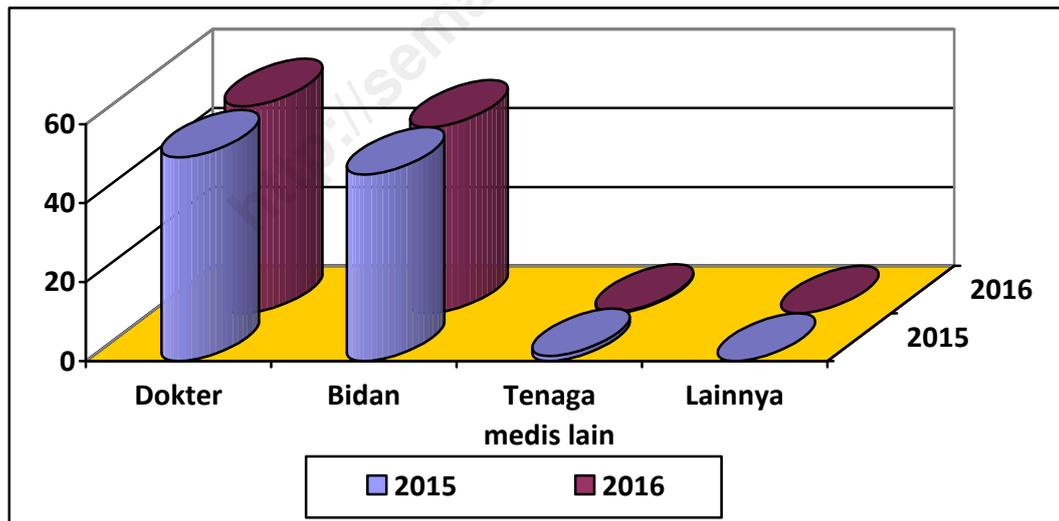
Dalam proses kelahiran tenaga penolong pada persalinan sangat menentukan keberhasilan persalinan maupun pengaruhnya terhadap kesehatan ibu dan bayi yang ditolong. Program pemerintah mengarahkan lebih ditingkatkannya pertolongan persalinan oleh tenaga yang profesional yaitu tenaga kesehatan. Proporsi pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan dapat dipakai sebagai salah satu indikator keberhasilan program pemerintah tersebut.

Tabel 5. Persentase Baduta Menurut Penolong Kelahiran

Penolong Kelahiran	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Dokter	51,59	52,49
2. Bidan	47,18	47,11
3. Tenaga Medis Lain	1,23	0,40
4. Lainnya	0,00	0,00

Sumber : BPS Kota Semarang

Gambar 4. Grafik Baduta Menurut Penolong Kelahiran Terakhir



Pada tahun 2016, proporsi balita menurut penolong kelahiran yang dilakukan oleh tenaga medis mencapai 100 persen, hal ini merupakan suatu indikasi bahwa masyarakat Kota Semarang sudah memahami akan makna

kesehatan terutama pada saat menentukan siapa penolong persalinan. Hal ini juga disebabkan oleh semakin banyaknya sarana maupun kuantitas tenaga medis penolong persalinan dan kemudahan akses maupun pelayanan yang semakin baik serta menyediakan fasilitas yang semakin terjangkau oleh kemampuan masyarakat.

3. Keluarga Berencana

Informasi keluarga berencana memberikan pengertian kepada pasangan suami istri mengenai usia terbaik hamil pertama kali, kapan berhenti melahirkan, berapa tahun jarak ideal antara anak yang satu dengan berikutnya dan jumlah anak yang ideal.

Pasangan usia subur hendaknya paham bahwa kehamilan bagi istri yang terlalu muda dan terlalu tua tidaklah baik bagi kesehatan bayi maupun wanita tersebut. Wanita yang belum berusia 20 tahun belum siap untuk hamil, baik dari segi fisik maupun psikis. Kemungkinan besar bayi yang lahir akan menderita berat badan lahir rendah (BBLR), yaitu berat badan bayi pada saat lahir kurang dari 2.500 gram. Begitu pula bila kehamilan terjadi pada wanita usia 35 tahun keatas, resiko kematian juga tinggi baik untuk Ibu maupun janinnya.

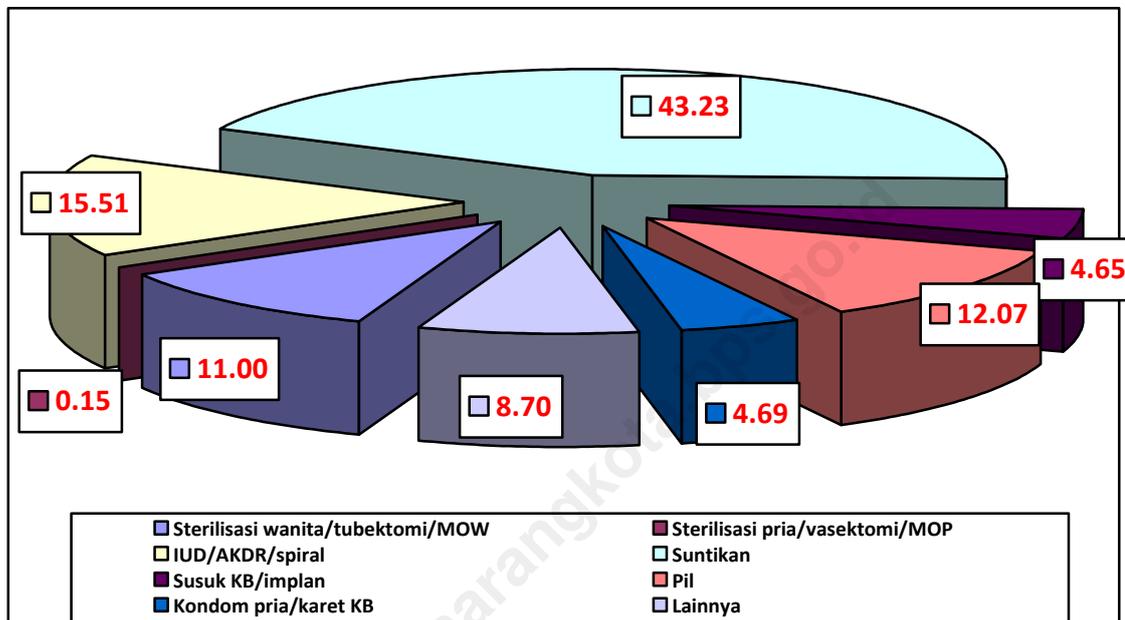
Tabel 6. Persentase Wanita Berumur 15 – 49 Tahun Berstatus Pernah Kawin Menurut Partisipasi Keluarga Berencana

Alat Kontrasepsi	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. MOW/Tubektomi	12,43	11.00
2. MOP/Vasektomi	1,31	0.15
3. IUD	11,66	15.51
4. Suntik	46,86	43.23
5. Susuk	8,48	4.65
6. Pil	10,92	12.07
7. Kondom	3,96	4.69
8. Lainnya	4,37	8.70

Sumber : BPS Kota Semarang

Sebanyak 51,88 persen Perempuan usia 15 – 49 tahun yang berstatus pernah kawin pada periode survei menyatakan sedang menggunakan alat/cara KB, 10,47 persen yang menyatakan tidak menggunakan lagi alat/cara KB dan 37,65 persen menyatakan tidak pernah menggunakan alat/cara KB. Pernyataan tidak pernah menggunakan alat/cara KB dipilih oleh mayoritas responden pasangan baru/muda, sedangkan pernyataan tidak menggunakan alat/cara KB dipilih karena alasan fertilitas antara lain: ingin punya anak lagi, mandul, menopause, puasa kumpul atau karena tradisi.

Gambar 5. Persentase Wanita Berumur 15 – 49 Tahun Berstatus Pernah Kawin Menurut Partisipasi Keluarga Berencana Tahun 2016



Minat masyarakat Kota Semarang terhadap alat/cara KB masih cukup tinggi. Tabel 6. Menunjukkan bahwa lebih dari 80 persen wanita berstatus pernah kawin umur 15-49 memakai alat/cara KB memilih alat kontrasepsi yang efektif. Hal ini merupakan suatu indikasi bahwa pengetahuan dan kesadaran serta kemampuan masyarakat dalam keluarga berencana sudah cukup tinggi, dengan demikian sangat berdampak pada kesehatan masyarakat pada umumnya dan kualitas masyarakat pada khususnya.

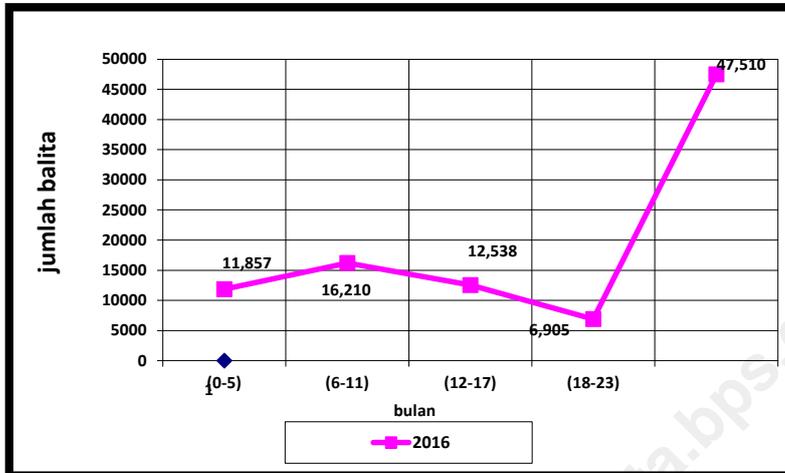
Peran serta kaum pria terhadap partisipasi keluarga berencana masih sangat kecil, hal ini terlihat dari 2 (dua) alat kontrasepsi untuk pria yakni MOP dan kondom hanya mencapai masing-masing sebesar 0,15 persen dan 4,69 persen pada tahun 2016.

4. Balita dan Ibu Menyusui

Pada umumnya ibu-ibu menyusui bayinya sampai usia dua tahun, namun banyak dijumpai ibu-ibu yang memberikan makanan tambahan terlalu dini, dibawah usia 6 bulan. Hal ini kurang dimengerti oleh para ibu bahwa kebutuhan gizi bayi 0-6 bulan cukup dengan ASI saja (gizi ibu menyusui terpenuhi menggunakan pola makan gizi seimbang). Alat cerna bayi (0-6) bulan baru dapat menerima makanan cair jadi belum siap untuk mencerna makanan padat. Pola pemberian ASI 0-6 bulan tanpa makanan tambahan pendamping ASI/minuman apapun termasuk air putih dikenal dengan istilah ASI Eksklusif.

Para ibu harus mengetahui bahayanya terhadap kesehatan bayi bila bayi diberi makan makanan tambahan terlalu awal. Bayi amat rawan terhadap penyakit infeksi, sehingga kalau diberi makanan tambahan terutama yang kurang higienis bayi akan mudah jatuh sakit. Bayi yang diare terutama disebabkan oleh makanan tambahan yang tidak higienis, dan apabila bayi sering diare akibatnya akan menderita kurang gizi. Padahal diketahui bahwa ASI cukup memenuhi seluruh kebutuhan bayi untuk tumbuh kembang sampai umur 6 bulan, oleh sebab itu bayi pada usia 0-6 bulan tidak memerlukan makanan tambahan.

Gambar 6. Jumlah Baduta Menurut Lamanya Disusui (bulan)
Tahun 2016



Terhadap bayi yang baru lahir, ASI harus terus langsung diberikan. ASI yang keluar pada hari-hari pertama yaitu sejak bayi dilahirkan sampai 5 hari disebut kolostrum. Kolostrum ini mengandung kaya zat-zat gizi dan zat kekebalan tubuh yang melindungi bayi terhadap berbagai penyakit infeksi. Karena itu kolostrum jangan dibuang tetapi harus diberikan kepada bayi.

Sesudah umur 6 bulan, ASI tidak lagi mencukupi seluruh kebutuhan bayi, karena itu bayi memerlukan makanan tambahan selain ASI yang disebut sebagai makanan pendamping ASI. Agar makanan tambahan ini dapat dikonsumsi oleh bayi dalam jumlah dan kualitas yang cukup maka perlu diperkenalkan sejak usia 4-6 bulan, dan pada usia 6 bulan dan seterusnya bayi sudah mendapat makanan tambahan disamping ASI dengan porsi dan ragam yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sesudah satu bulan ibu melahirkan, vitamin A dan pil yang mengandung zat besi perlu diberikan kepada ibu yang menyusui. Kedua macam zat gizi ini diperlukan untuk memulihkan kembali kesehatan ibu. Disamping itu ibu perlu makan makanan bergizi yang berasal dari bermacam-macam bahan makanan/penganekaragaman menu dengan pola gizi seimbang dan minum susu agar ASI yang keluar bermutu tinggi dan ibu sehat.



BAB IV

JNDIKATOR BIDANG

PENDIDIKAN

<http://semarangkota.go.id>

INDIKATOR BIDANG PENDIDIKAN

Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian dan meningkatkan kemampuan di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Usaha ini sudah tentu bukan hanya merupakan perorangan dan bukan pula hanya merupakan usaha pemerintah tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga.

Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila di segi lain bertujuan untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan ketrampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab terhadap pembangunan bangsa.

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu Pemerataan kesempatan, Relevansi pendidikan dengan pembangunan, Kualitas pendidikan dan Efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gedung sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi. Relevansi pendidikan merupakan konsep *link and match*, yaitu pendekatan atau strategi meningkatkan relevansi sistem pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja. Kualitas pendidikan adalah menghasilkan manusia terdidik yang bermutu dan handal sesuai dengan tuntutan zaman. Sedangkan efisiensi pengelolaan

pendidikan dimaksudkan bahwa pendidikan diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tetapi untuk bisa melihat dengan jelas dan terarah dalam mengimplementasikan program pendidikan diperlukan ukuran atau indikator pendidikan yang lengkap, terarah dan handal. Indikator pendidikan paling sedikit dapat dibagi menjadi tiga kelompok yaitu Indikator input, Indikator proses dan Indikator output/dampak. Indikator input merupakan informasi atau keterangan dasar dan penunjang yang diperlukan dalam perencanaan program pendidikan. Indikator proses menunjukkan keadaan proses pendidikan atau bagaimana program pendidikan yang diimplementasikan terjadi di masyarakat. Sedangkan indikator output adalah hasil-hasil yang dicapai oleh masyarakat setelah melalui proses pendidikan.

1. Rasio Murid-Guru

Sebelum membahas proses dan hasil dari upaya pembangunan pendidikan, penting diungkapkan lebih dahulu keadaan peserta didik, sarana dan prasarana pendidikan. Dari data pada tabel 7, bisa diperoleh beberapa indikator pendidikan yang bisa lebih memperjelas atau memudahkan pemahamannya. Indikator tersebut adalah Rasio Murid Guru. Rasio Murid Guru untuk melihat beban kerja guru dalam mengajar, disamping itu dapat pula menggambarkan mutu pengajaran dikelas karena semakin tinggi nilai rasio ini berarti semakin berkurang tingkat pengawasan atau perhatian guru terhadap murid.

Tabel 7. Banyaknya Sekolah, Murid dan Guru Menurut Jenjang Pendidikan Kota Semarang Tahun 2016

Uraian	SD/MI	SLTP/MTs	SLTA/MA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Sekolah	591	220	189
2. Jumlah Murid	153151	73.475	70.516
3. Guru	7.830	4.617	5301
4. Rasio Murid-Guru	19,56	15,91	13,30

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Semarang

Pada tahun 2016 Rasio Murid Guru di Kota Semarang untuk jenjang pendidikan SD/MI sebesar 19 yang berarti satu orang guru rata-rata mengajar 19 murid, sedangkan tingkat SLTP / MTs secara rata-rata seorang guru menangani 16 murid dan tingkat SLTA / MA secara rata-rata seorang guru menangani 13 murid.

2. Partisipasi Sekolah

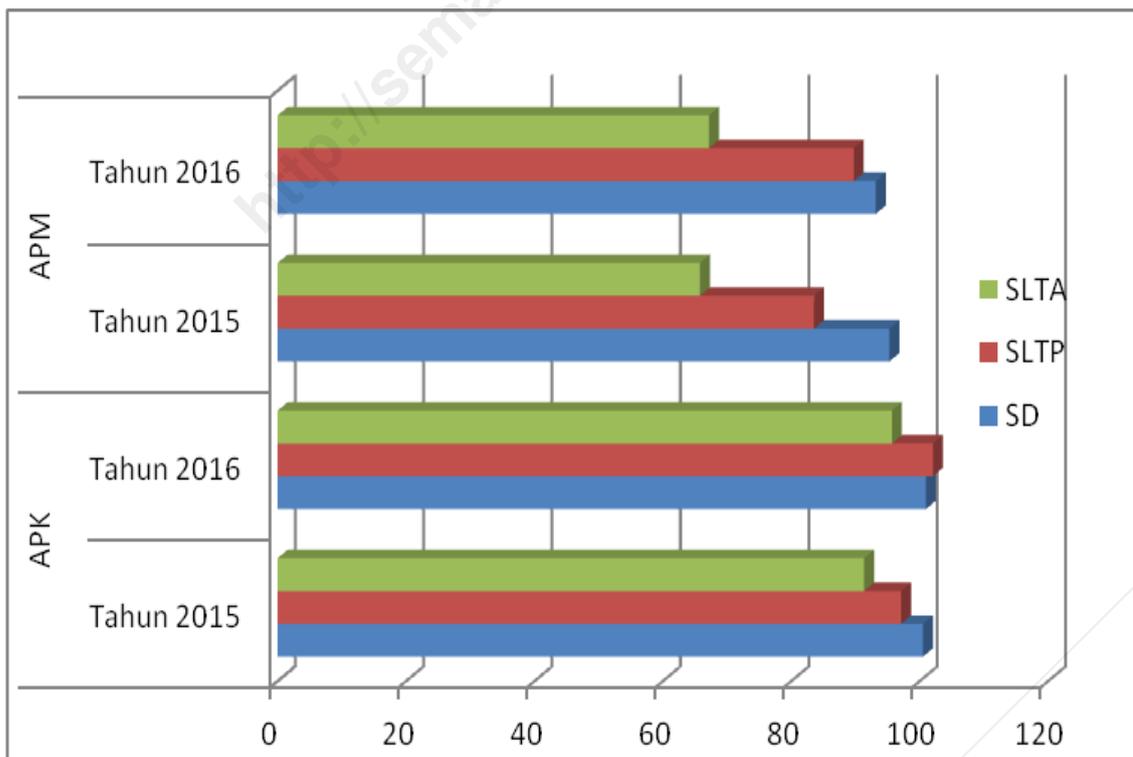
Indikator partisipasi sekolah termasuk dalam indikator proses yang dalam pembahasan disini diantaranya adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). APK adalah indikator untuk mengukur proporsi anak sekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu dalam kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK memberikan gambaran secara umum tentang banyaknya anak yang sedang/telah menerima pendidikan pada jenjang tertentu. Sedangkan APM adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak sekolah pada satu kelompok umur tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya.

Tabel 8. Nilai APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan Kota Semarang

Uraian	SD	SLTP	SLTA
(1)	(2)	(3)	(4)
1. APK Tahun 2015	100,54	97,12	91,34
2. APK Tahun 2016	101,01	102,09	95,68
3. APM Tahun 2015	95,31	83,56	65,79
4. APM Tahun 2016	93,20	89,75	67,20

Sumber : BPS Kota Semarang

Gambar 7. Grafik Nilai APK dan APM Menurut Jenjang Pendidikan Kota Semarang



Angka APM tahun 2016, pada jenjang pendidikan SD mencapai 93 persen, sedikit lebih rendah bila dibandingkan tahun sebelumnya. Keadaan ini disebabkan karena sebagian anak usia 7-12 tahun telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan sebagian kecil diantara anak usia kurang dari 7 tahun sudah menjadi siswa pada jenjang Sekolah Dasar.

Angka partisipasi murni (APM) 2016 pada jenjang pendidikan SLTP juga sedikit lebih tinggi bila dibandingkan tahun sebelumnya. Angka APM SLTP 2016 mencerminkan bahwa terdapat 11 persen anak usia 13 sampai dengan 15 yang masih belum/tidak tertampung pada jenjang pendidikan ini. Kemungkinan yang dapat mendukung kondisi tersebut namun masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut adalah pertama: anak usia 13-15 tahun tersebut masih/sedang menjalani pendidikan yang lebih rendah (SD) dan atau lebih tinggi (SLTA), kedua: anak usia 13-15 tahun sudah tidak menjalani proses pendidikan (drop out).

Sedangkan APM SLTA 2016 mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun sebelumnya yakni dari 60,57 pada 2014 menjadi 67,20 di tahun 2016. Persentase APM SLTA akan selalu lebih kecil dari APM pada jenjang pendidikan dibawahnya, karena dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan lebih membutuhkan biaya yang lebih banyak serta kemauan yang lebih besar. Dan untuk mencapai nilai APM yang lebih tinggi dibutuhkan peran serta dari masyarakat maupun pemerintah.

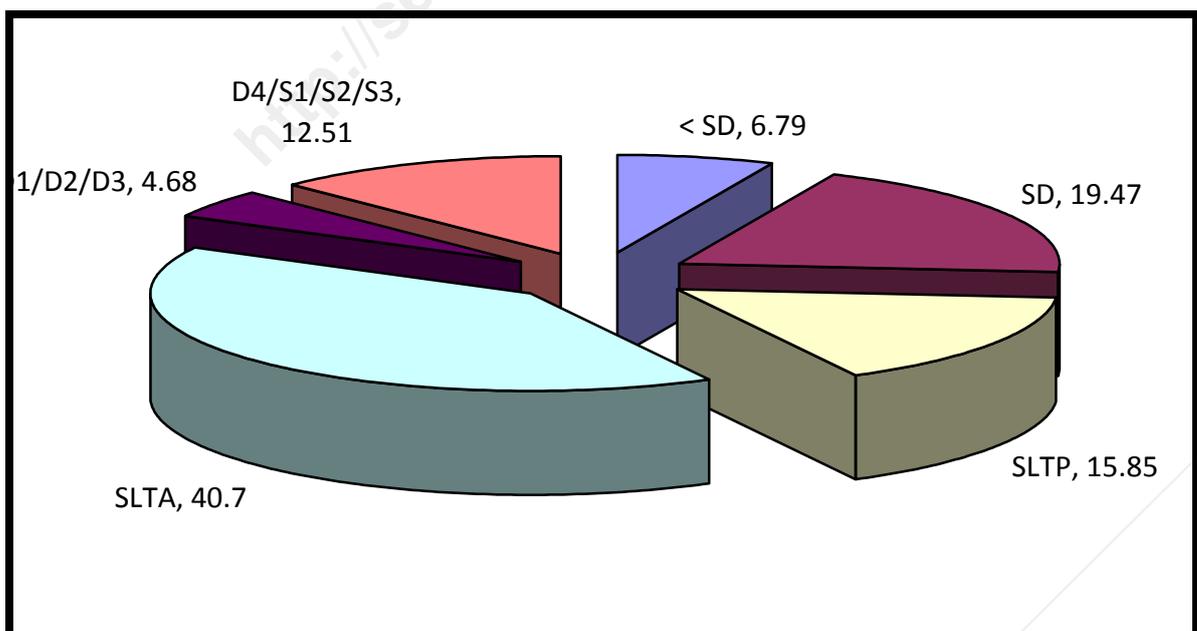
3. Kemampuan Baca Tulis dan Tingkat Pendidikan

Pada tingkat makro ukuran yang sangat mendasar dari pendidikan adalah kemampuan membaca dan menulis penduduk yang lebih dikenal dengan angka melek huruf. Pada tahun 2016 angka melek huruf mencapai

98,90 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 97,85 persen, dengan demikian masih terdapat sekitar 1 persen penduduk yang masih buta huruf yang didominasi oleh penduduk berusia lanjut. Bila dilihat menurut jenis kelamin, angka melek huruf tidak terlihat perbedaan yang mencolok, dimana angka melek huruf untuk laki-laki sebesar 99,52 persen sedangkan untuk perempuan sebesar 98,31 persen.

Kualitas sumber daya manusia secara spesifik dapat dilihat pada tingkat pendidikan yang ditamatkan. Pada tahun 2016 persentase penduduk umur 15 tahun keatas yang berpendidikan SLTP keatas telah mencapai 73 persen. Secara lebih detil komposisi penduduk berusia 15 tahun keatas dirinci menurut ijazah yang dimiliki dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 8. Persentase Penduduk 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan Kota Semarang Tahun 2016





BAB V

JNDJKATOR BJDANG KETENAGAKERJJAAN

<http://semarangkota.go.id>

INDIKATOR BIDANG KETENAGAKERJAAN

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Dimensi ekonomi menjelaskan kebutuhan manusia akan pekerjaan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sedangkan dimensi sosial dari pekerjaan berkaitan dengan pengakuan masyarakat terhadap kemampuan individu. Salah satu sasaran utama pembangunan ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai agar dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahun.

1. Angkatan Kerja dan Pengangguran

Dilihat menurut kegiatannya pada dasarnya penduduk yang sudah berumur 15 tahun keatas dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan, sedangkan bukan angkatan kerja adalah penduduk yang sedang sekolah dan kegiatan lainnya misalnya mengurus rumah tangga.

Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi salah satunya diukur dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu merupakan perbandingan antara jumlah angkatan kerja dengan jumlah penduduk usia kerja. TPAK tahun 2015 sedikit mengalami penurunan dibandingkan tahun 2014, yaitu dari 68,43 persen menjadi 66,96 persen. Banyaknya angkatan kerja ini mengisyaratkan akan perlunya lapangan pekerjaan yang cukup banyak guna menampung banyaknya penawaran

angkatan kerja. Bila dilihat menurut jenis kelamin seperti pada tabel 9, besarnya TPAK laki-laki pada tahun 2014 adalah 81,97 persen turun menjadi 78,54 persen pada tahun 2015, dan TPAK perempuan naik dari 55,72 persen menjadi 56,09 persen.

Disamping itu indikator lain yang cukup penting dibidang ketenagakerjaan adalah tingkat pengangguran, dimana dapat menunjukkan sampai sejauh mana angkatan kerja yang ada terserap dalam pasar kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan terhadap angkatan kerja. Pada tahun 2014, TPT sebesar 7,76 persen, sedangkan pada tahun 2015 sebesar 5,77 persen. Bila dirinci menurut jenis kelamin, TPT laki-laki mengalami penurunan yakni dari 8,00 menjadi 5,31 pada tahun 2015, kondisi yang sama terjadi pada TPT perempuan yakni dari 7,42 pada tahun 2014 menjadi 6,37 pada tahun 2015.

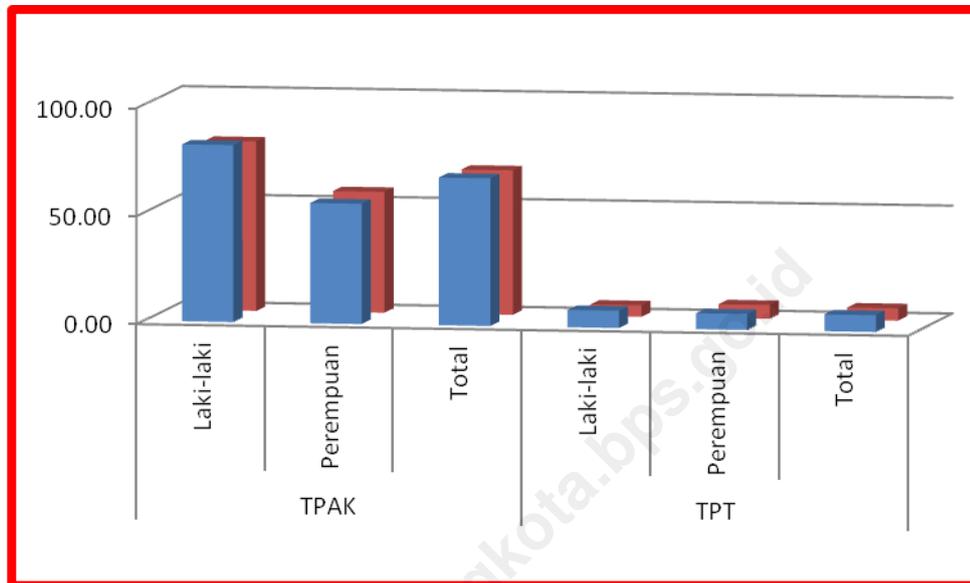
Hal ini menjadi indikasi bahwa jumlah penduduk perempuan yang masuk kedalam pasar kerja semakin banyak, dengan tingkat penyerapan tenaga kerja perempuan yang cukup banyak pula.

Tabel 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Indikator		2014	2015
(1)		(2)	(3)
TPAK	Laki-laki	81,97	78,54
	Perempuan	55,72	56,09
	Total	68,43	66,96
TPT	Laki-laki	8,00	5,31
	Perempuan	7,42	6,37
	Total	7,76	5,77

Sumber : BPS Kota Semarang

Gambar 9. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Semarang



2. Lapangan Usaha dan Status Pekerjaan

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja. Selain itu juga biasa digunakan sebagai ukuran untuk menunjukkan struktur perekonomian suatu wilayah. Lapangan usaha atau sektor yang paling banyak digeluti oleh penduduk Kota Semarang pada tahun 2014 adalah sektor perdagangan (31,71 %) kemudian sektor industri (24,58 %) dan sektor jasa-jasa (20,17 %). Banyaknya penduduk yang bekerja di ketiga sektor utama tersebut sebesar (76,46 %) bisa dipahami mengingat Kota Semarang sebagai ibu kota Provinsi Jawa Tengah merupakan pusat kegiatan perdagangan, jasa dan industri.

Status pekerjaan yang ditekuni oleh penduduk Kota Semarang pada tahun 2015 dapat diurutkan sebagai berikut : sebanyak 68,18 persen dari total

penduduk bekerja berstatus pekerjaan sebagai buruh/karyawan; pada urutan kedua status pekerjaan berusaha sendiri yakni sebesar 16,34 persen; urutan ketiga pekerjaan dengan status berusaha dibantu buruh tetap sebesar 4,22 persen; urutan keempat adalah pekerjaan dengan pekerja tidak dibayar sebesar 4,13 persen; urutan kelima pekerjaan dengan status berusaha dengan dibantu buruh tidak tetap sebesar 3,98 persen, dan urutan terakhir pekerjaan dengan status pekerja bebas sebesar 3,15 persen.

Tabel 10. Persentase Penduduk Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Kota Semarang

Status Pekerjaan	2014	2015
(1)	(2)	(3)
1. Berusaha sendiri	15,34	16,34
2. Berusaha dg dibantu buruh tdk tetap	5,43	3,98
3. Berusaha dg dibantu buruh tetap	4,61	4,22
4. Buruh/Karyawan	67,01	68,18
5. Pekerja bebas	3,47	3,15
6. Pekerja tak dibayar	4,12	4,13

Sumber : BPS Kota Semarang



BAB VI

JNDIKATOR BIDANG

PERUMAHAN

<http://semarangkota.go.id>

INDIKATOR BIDANG PERUMAHAN

Sebagai salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung saja tetapi juga sebagai tempat tinggal. Karena itu aspek kesehatan dan kenyamanan dan bahkan estetika bagi sekelompok masyarakat tertentu sangat menentukan dalam pemilihan rumah tinggal dan ini berkait dengan tingkat kesejahteraan penghuninya.

Secara umum, kualitas rumah tinggal ditentukan oleh kualitas bahan bangunan yang digunakan, yang secara nyata mencerminkan tingkat kesejahteraan penghuninya. Selain kualitas rumah tinggal, fasilitas yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari juga mencerminkan tingkat kesejahteraan. Oleh karena itu keadaan dan kualitas serta fasilitas lingkungan perumahan merupakan faktor yang sangat penting karena dapat memberikan sumbangan dalam kenyamanan hidup sehari-hari.

Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 69,30 persen rumahtangga di Kota Semarang menempati tempat tinggal dengan status milik sendiri. Kemudian 14,10 persen rumahtangga dengan status mengontrak/sewa, dan sisanya dengan status bebas sewa/dinas/rumah milik orangtua/lainnya sebesar 16,40 persen.

1. Kondisi Perumahan

Atap rumah merupakan salah satu unsur rumah yang sangat vital. Tidak saja berfungsi sebagai pelindung terhadap panas matahari dan hujan, atap rumah menurut jenisnya juga berpengaruh pada kesehatan bagi penghuninya. Pada tahun 2016 menunjukkan bahwa 3,35 persen rumah

beratapkan beton, kemudian 75,24 persen beratapkan genteng dan 21,41 beratapkan asbes /seng /lainnya.

Tabel 11. Persentase Rumah Menurut Jenis Atap

Jenis Atap	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Beton	3,35	3,40
2. Genteng	75,24	73,38
3. Seng	0,56	0,75
4. Asbes/lainnya	20,85	22,47

Sumber : BPS Kota Semarang

Rumah yang nyaman adalah rumah yang relatif besar sehingga penghuninya tidak berdesakan. Pada tahun 2016 tercatat sekitar 24,84 persen rumahtangga yang tinggal dalam rumah dengan luas lantai kurang dari 50 meter persegi. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2015 (25,91 %) mengalami sedikit penurunan.

Fasilitas air bersih merupakan salah satu indikator dalam penentuan rumahtangga miskin. Pada tahun 2016 persentase rumahtangga menggunakan air kemasan atau ledeng sebagai sumber air minum adalah sebesar 80,83 persen, sedangkan sisanya menggunakan air dari sumur, mata air dan lain-lain.

Tabel 12. Beberapa Indikator Kualitas Rumah

Indikator Kualitas Rumah	2015	2016
(1)	(2)	(3)
1. Luas Lantai < 50 m ²	25,91	24,84
2. Lantai bukan tanah	96,59	96,63
3. Atap Beton / genteng	78,59	76,78
4. Dinding tembok	92,69	91,68
5. Penerangan Listrik	100,00	100,00
6. Air Minum leding / air kemasan	73,05	80,83
7. Jamban sendiri dg tanki septic	73,42	76,27

Sumber : BPS Kota Semarang

2. Kualitas Perumahan

Kualitas perumahan di Kota Semarang menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Hal ini terlihat dari persentase rumah tangga yang memiliki rumah layak huni. Bila dilihat dari kualitas bangunan yang digunakan kondisinya mengalami peningkatan kualitas, yang dilihat dari semakin banyaknya rumah tinggal dengan atap layak dan tembok yang permanen.

Kelengkapan fasilitas pokok suatu rumah akan menentukan nyaman tidaknya suatu rumah tinggal, yang juga menentukan kualitas penghuninya. Fasilitas pokok yang penting agar suatu rumah menjadi nyaman dan sehat untuk ditinggali adalah tersedianya listrik, air bersih/leding, serta jamban sendiri dengan tanki septic.

Pada tahun 2016, 100 persen rumah tangga telah menggunakan listrik sebagai alat penerangannya. Sedangkan akses rumahtangga pada air leding/kemasan sudah lebih dari 60 persen. Untuk ketersediaan jamban sendiri dengan tanki septik pada tahun 2016 mencapai 76,27 persen rumah tangga sudah menggunakannya.

<http://semarangkota.bps.go.id>

<http://semarangkota.bps.go.id>



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA SEMARANG**

Jln. Inspeksi Kali Semarang no.1, Semarang, Jawa Tengah

Telp/ Fax 024-3546413

E-mail : bps3374@bps.go.id

Website : <http://semarangkota.bps.go.id>